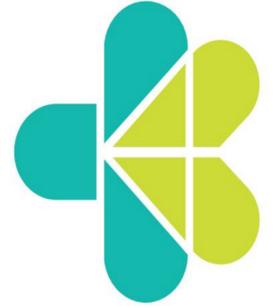


Keterlibatan Stakeholder pada Program Eliminasi Filariasis di Pasaman Barat dari Perspektif Konfigurasi Organisasi

Agung Puja Kesuma^{1,2}, Bina Ikwati²

¹Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat FKKMK Universitas Gadjah Mada

²Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Banjarnegara



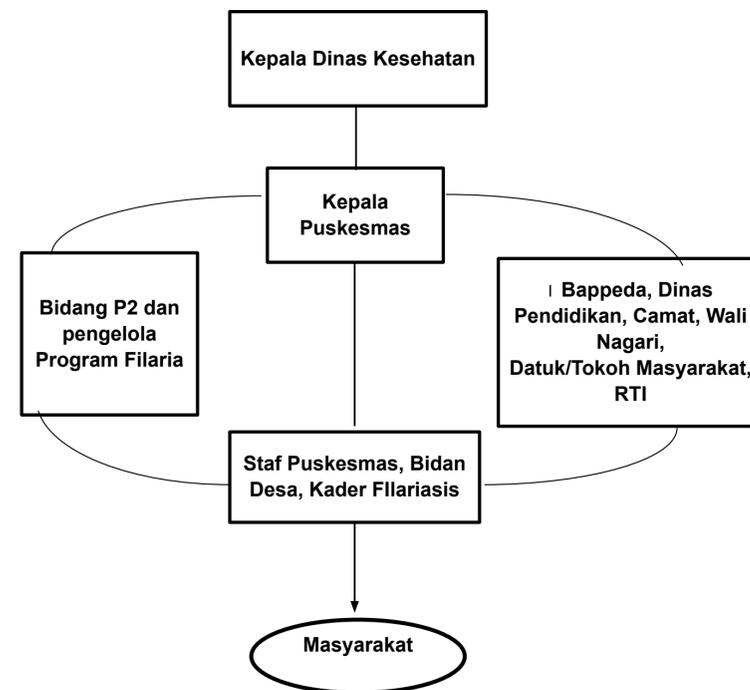
PENDAHULUAN

Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) satu tahun sekali selama 5 tahun merupakan salah satu strategi program eliminasi filariasis di daerah endemis Filariasis. Program ini melibatkan banyak stakeholder untuk mencapai Indonesia Bebas Filariasis 2020. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten yang telah selesai melaksanakan POPM pada tahun 2015 dan telah lulus survei evaluasi penularan filariasis TAS-1 pada tahun 2016.(1) Pelaksanaan program tersebut melibatkan banyak stakeholder sehingga tulisan ini bertujuan mengeksplorasi stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan POPM dan peran yang telah dilakukan dalam pelaksanaan POPM dari perspektif konfigurasi organisasi.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan berjumlah 13 orang terdiri dari 5 informan kunci dan 8 informan triangulasi.

HASIL



Dalam perpektif struktur organisasi, tugas dan fungsi organisasi dapat dibagi menjadi 5 komponen(2,3). Identifikasi terhadap stakeholder yang terlibat dalam eliminasi filariasis dari perspektif struktur organisasi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) *Strategic apex* yang memiliki tanggungjawab terhadap keseluruhan organisasi dan membuat keputusan stratejik dalam organisasi yaitu Kepala Dinas Kesehatan

2) *Technostructure* memiliki fungsi melatih dan mengevaluasi pelaksanaan layanan yang dilakukan *operating core* dan memberikan saran kepada top manajemen, dilaksanakan oleh Bidang P2 Dinas Kesehatan.

3) *Middle line* merupakan penghubung antara *operating core* dan *strategic apex*. Middle line memiliki fungsi supervisi langsung kepada pelaksana di lapangan dan memastikan program layanan dapat diterima dan diimplementasikan kepada masyarakat. Posisi ini dilakukan oleh Kepala Puskesmas.

4) Supporting staf memiliki fungsi sebagai pendukung dalam organisasi, dapat berupa logistic, keuangan, administrasi. Dalam program ini sebagai supporting staf adalah Bappeda, Dinas Pendidikan, Camat, Wali Nagari, Tokoh Masyarakat, RTI (LSM Internasional)

5) *Operating core* adalah pelaksanan kegiatan atau pemberi layanan yang berhubungan langsung dengan client/konsumen. Pelayanan POPM dilaksanakan oleh Bidan Desa, Staf Puskesmas, dan Kader. Mereka memastikan setiap penduduk mulai usia 2 tahun menerima dan meminum obat.

Pasaman Barat melakukan kegiatan POPM selama 2 periode, periode 1 tahun 2007-2011 pada saat evaluasi (pre TAS) masih ditemukan transmisi penularan

sehingga dilanjutkan periode kedua tahun 2014 dan 2015. Pada periode kedua ini POPM berjalan lebih baik dan hasil evaluasi mf rate 0.09 %. Angka minum obat berdasarkan sasaran sudah memenuhi target yang ditetapkan, pada putaran pertama berkisar 87,8-91,3% dan pada putaran kedua 87,0-96,2%.(4, 5) Keberhasilan ini tidak terlepas dari keterlibatan lintas sector diatas

KESIMPULAN

Keterlibatan stakeholder sangat diperlukan dalam pelaksanaan dan keberhasilan program eliminasi filariasis. Keterlibatan stakeholder tersebut dapat dijabarkan dalam suatu pendekatan konfigurasi organisasi supaya dapat memudahkan dalam mengidentifikasi peran masing-masing stakeholder.

REFERENSI

- [1] Suprpto A, Senewe FP, Irianti S, Anorital, Hananto M, Rachmawati F, et al. Laporan Penelitian Studi Evaluasi Eliminasi Filariasis di Indonesia Tahun 2017 (Studi Multisenter Filariasis). Vol. 2017. Jakarta: Badan Litbang Kesehatan; 2017.
- [2] Jean-pierre U, Jean M, Marleen B, Franc, B. Through Mintzberg ' s Glasses : a Fresh Look at The Organization of Ministries ofHealth. Bulletin of the World Health Organization. 2000;78(8):1005-13.
- [3] Riyono B. Konsep Dasar dalam Mendesain Organisasi. Buletin Psikologi [Internet]. 2006;14(1). Available from: <https://journal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/viewFile/7486/5820>
- [4] Kesehatan K. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Filariasis. 2014.
- [5] Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat. Laporan Tahunan Seksi Pemberantasan Penyakit. Kabupaten Pasaman Barat; 2016.